

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS *PURNA*  
JUAL MOBIL *COMPLETELY BUILT UP* (CBU) DI LUAR AGEN  
TUNGGAL PEMEGANG MEREK (ATPM)**

**SKRIPSI**

**DI AJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS – TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
HUKUM**



**PRO PATRIA**

**Oleh :**

**Ach.Risdhiansya Faiz**

**NIM : 02111058**

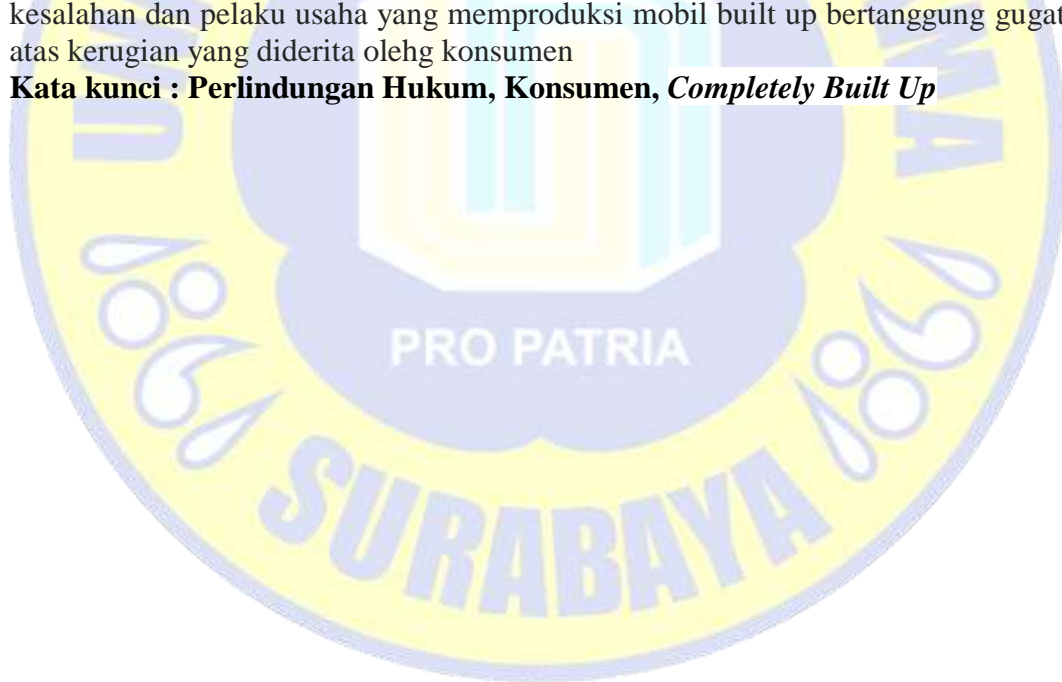
**PROGRAM ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2018**

## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas *Purna Jual Mobil Completely Built Up (CBU)* Di Luar Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)”, membahas permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up* dan Apakah importir bertanggung gugat atas hak konsumen purna jual mobil *built up*, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up*, bahwa konsumen membeli mobil *built up* mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* tersebut sebagaimana pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dilindungi oleh hukum. apabila kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan fasilitas purna jual, maka dikatakan melanggar hak konsumen. Importir adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, karena importir terikat dalam perjanjian pemberian kuasa dari Pelaku usaha yang memproduksi mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul karena kesalahan dari importir, kecuali pelaku usaha yang memproduksi mobil dapat membuktikan importir melakukan perbuatan melanggar kuasa, maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggung jawab atas kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Completely Built Up***



## DAFTAR ISI

|                                                      | Halaman |
|------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                            | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                             | iii     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....              | iv      |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....                 | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                 | vi      |
| ABSTRAK .....                                        | ix      |
| ABSTRACT .....                                       | x       |
| DAFTAR ISI .....                                     | xi      |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                            | 1       |
| 1.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya ... | 1       |
| 1.2. Penjelasan Judul .....                          | 6       |
| 1.3. Alasan Pemilihan Judul .....                    | 7       |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                         | 8       |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....                        | 8       |
| 1.6. Metode Penelitian.....                          | 8       |
| 1. Tipe Penelitian .....                             | 8       |
| 2. Pendekatan Masalah .....                          | 9       |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                          | 10      |
| 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan         |         |

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hukum .....                                                                              | 10       |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....                                                            | 11       |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematis .....                                                 | 11       |
| BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN                                             |          |
| ATAS PURNA JUAL MOBIL <i>BUILT UP</i> .....                                              | 13       |
| 2.1. Mobil <i>Built Up</i> .....                                                         | 13       |
| 2.2. Importir Umum .....                                                                 | 16       |
| 2.3. Perjanjian Pemberian Kuasa .....                                                    | 24       |
| 2.4. Perlindungan Konsumen .....                                                         | 30       |
| BAB III : TANGGUNG GUGAT IMPORTIR ATAS HAK                                               |          |
| KONSUMEN PURNA JUAL MOBIL <i>BUILT UP</i> .....                                          | 41       |
| 3.1. Konsep Tanggung Gugat .....                                                         | 41       |
| 3.2. Tanggung Gugat Importir Atas Hak Konsumen Purna<br>Jual Mobil <i>Built Up</i> ..... | 49<br>58 |
| BAB IV : PENUTUP .....                                                                   |          |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                    | 59       |
| 4.2. Saran .....                                                                         |          |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                           |          |



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up*, bahwa konsumen membeli mobil *built up* mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* tersebut sebagaimana pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dilindungi oleh hukum. apabila kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan fasilitas purna jual, maka dikatakan melanggar hak konsumen.
- 4.1.2. Importir adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, karena importir terikat dalam perjanjian pemberian kuasa dari Pelaku usaha yang memproduksi mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul karena kesalahan dari importir, kecuali pelaku usaha yang memproduksi mobil dapat membuktikan importir melakukan perbuatan melanggar kuasa, maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggungjawab atas kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

## 4.2. Saran

4.2.1. Pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, wajib menyediakan fasilitas purna jual untuk kepentingan konsumen, agar tidak terjadi gugatan ganti rugi oleh konsumen.

4.2.2. Hendaknya importir mensosialisasikan mengenai tanggungjawabnya atas mobil *built up* yang dijualnya, agar konsumen dapat menuntut haknya jika hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus et.all., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djulami, Surabaya, 1979
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Subekti, *Aneka perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999

Susilo, P., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Distributor*. 2002

Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1992

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

